BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan dijaga. Anak termasuk dalam subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dan jaminan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi orang lain seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2).² Munculnya kekerasan itu pada mulanya karena proses bekerjanya situasi ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat dan pada umumnya ada korelasi yang signifikan terhadap ketidakmampuan penguasa dalam menyediakan sumber penghidupan yang layak dan berkeadilan.³ Anak secara umum adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang Perlindungan Anak.⁴ Setiap anak mempunyai hak-hak yang sama satu dengan lainnya, yaitu

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28B Ayat (2)

³ Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 85.

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan di segala satuan pendidikan.⁵ Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶ Oleh karena itu apabila anak berhadapan dengan hukum maka anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷ Anak mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyandang disabilitas berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas adalah

⁵ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) dan (1a).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2).

⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸ Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Latar belakang penetapan Permen PPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah:⁹

- a. bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual.
- b. bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

⁹ Permen PPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di Masyarakat.

- c. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- d. bahwa upaya untuk memenuhi hak serta mempercepat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas perlu dikoordinasikan dengan baik dalam suatu program kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga dan Masyarakat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Salah satu tujuan diadakannya pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan Penghormatan, kemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Dalam kasus- kasus yang akan atau bahkan sudah diputus di

pengadilan akan melewati proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Salah satu bentuk proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menjadi acuan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana terhadap anak adalah dengan pengambilan keterangan saksi.

Faktanya masih ditemukan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah di Madiun. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.¹⁰ Seperti halnya di Yayasan Bananul Amanah Madiun merupakan sebuah Yayasan Khusus untuk menampung khusus anak penyandang disabilitas terlebih untuk anak-anak. Anak penyandang disabilitas yang tinggal di yayasan hampir semuanya ikut dalam pendidikan mulai dari SD hingga SMA, sehingga anak yang berada di yayasan tetap mendapatkan dan tidak tertinggal di dalam pendidikan. Selain itu anak yang berada di yayasan Bananul Amanah Madiun juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan skill untuk kedepannya nantinya saat terjun langsung dimasyarakat.

Dengan adanya pelatihan dan juga sarana prasarana yang ada di

¹⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 5

yayasan Bananul Amanah Madiun didapatkan dari donatur yang bekerja sama dengan yayasan serta anggaran dari wilayah desa setempat serta pemerintah kota Madiun. Adanya kerjasama dengan wilayah setempat sehingga anak penyandang disabilitas dapat mendapatkan fasilitas yang memadai dan juga cukup baik tanpa adanya kekurangan baik dari fasilitas maupun kebutuhan dalam sehari harinya.

Berdasarkan dari hal tersebut, penulis tertarik dan memiliki minat yang mendalam dalam topik yang dibahas. Penulis merasa bahwa penelitian yang dilakukan akan memberikan pemahaman yang lebih luas serta memberikan wawasan baru terkait dengan kesetaraan penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas Dengan Tujuan Mendapatkan Aksesibilitas Dan Perlakuan Yang Setara Dimasyarakat (Studi Kasus Di Yayasan Bananul Amanah Madiun

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun?
2. Bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun berdasarkan maqashid syariah Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun sudah terlaksana atau belum.
2. Untuk menganalisis perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun berdasarkan peraturan menteri negara

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu :

D. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Terutama dalam bidang ilmu hukum dengan fokus penelitian terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan topik yang sama yaitu perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun.

E. Manfaat praktisi

- a. Bagi penyandang disabilitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi anak penyandang disabilitas dan juga dapat memberikan informasi terkait perlindungan yang seharusnya didapatkan bagi mereka

anak penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumentasi serta referensi bagi Yayasan terkait yaitu Yayasan Bananul Amanah Madiun.

b. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah bahwa di Yayasan Bananul Amanah Madiun ada sebuah panti asuhan anak berkebutuhan khusus yang mana setiap anak penyandang disabilitas memerlukan perhatian lebih dari lingkungan sekitar termasuk pemerintah setempat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun informasi yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dan dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna terkait topik pembahasan yang sama.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran, berikut ini adalah beberapa istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam

waktu jangka yang lama dan sulit untuk berinteraksi terhadap lingkungan sekitar, sehingga anak penyandang disabilitas memerlukan. khusus karena anak penyandang disabilitas berbeda dengan anak pada umumnya.¹¹ Anak disabilitas memiliki hak hak yang tidak sama dengan anak pada umumnya, anak disabilitas memiliki hak-hak sendiri yang diatur dalam UU No.19 tahun 2011 tentang pengesahan “*Convention On The Rights Of Person With Disabilities*” (Konveksi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang gunanya untuk melindungi anak tersebut dan juga mendapatkan perlindungan dari segi hukum. Anak penyandang disabilitas terbagi menjadi disabilitas fisik dan mental dan juga bawaan dari lahir serta disabilitas akibat kelalaian atau kecelakaan dalam kerja.

b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin serta melindungi anak agar mendapatkan hak-haknya dan juga terhindar dari diskriminasi maupun bullying.¹² Peraturan

¹¹ Anak penyandang disabilitas, <https://paralegal.id/pengertian/anak-penyandang-disabilitas/> diakses pada 18 september 2023 pukul 20.39

¹² Perlindungan anak, <https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak> diakses pada 18 september 2023 pukul 21.05

mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan keadaan Masyarakat yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 didalamnya berisi bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.¹³ Perlindungan anak merupakan isu penting dan dianggap sangat penting Penting untuk mengerjakan hal-hal yang berkembang dalam hidup masyarakat, seperti prostitusi yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Masalah lain yang sering dihadapi anak-anak adalah kekerasan di rumah dan di sekolah yang berhubungan dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, agama dan adat istiadat Hal-hal lain juga ditemukan dalam pembangunan kemajuan teknologi menyebabkan anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya perdagangan anak dan pornografi anak.¹⁴

- c. PERMEN PPPA NO. 4 TAHUN 2017, Tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas.

PERMEN PPPA merupakan peraturan menteri

¹³ Assad alfaruq, perlindungan hukum dan HAM bagi anak penyandang disabilitas, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 3.

¹⁴ Muhammad Fachri Said, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm. 146.

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimana kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. Perlindungan anak penyandang disabilitas diatur pada PERMEN PPPA No. 4 Tahun 2017 didalam peraturan tersebut terdapat V (Lima) BAB. Peraturan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diatur pada bab ke II dari pasal 4 sampai dengan pasal 9, isi dari pasal tersebut disebutkan dan dijelaskna pada poin pembahasan.

d. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berkaitan erat dengan hukum Islam. Maqashid syariah berperan penting dalam menyelaraskan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan perubahan social.¹⁵ Subjek pokok dalam perspektif Maqhasid Syariah klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan tokoh Jasser Auda sebagai acuan dalam penelitian, ada beberapa aspek

¹⁵ Lina Nur Anisa, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 12, no. 1 (June 26, 2018), hlm.117–132

yang terdapat dalam maqashid syariah Jasser Auda yang berkaitan dengan perlindungan bagi anak pada umumnya dan juga dapat diterapkan bagi penyandang disabilitas, diantaranya yaitu :

a. Hifzh An-Nafs

Yaitu menjaga jiwa, dengan maksud melindungi jiwa anak disabilitas adalah kewajiban dalam perspektif maqashidsyariah. Hal ini mencakup memberikan akses terhadap perawatan medis, terapi dan dukungan mental yang diperlukan untuk memastikan kesehatan jiwa mereka.

b. Hifzh Al-Aql

Yaitu menjaga akal. Anak penyandang disabilitas umumnya memerlukan perhatian khusus terkait dengan pengembangan kognitif dan kecerdasan mereka. Dalam konteks ini, maqashidsyariah menunjukkan pentingnya memberikan akses terhadap pendidikan inklusif dan dukungan pembelajaran yang memadai untuk anak-anak ini agar mereka dapat mengembangkan potensi intelektual mereka sebaik mungkin.

c. Hifzh An-Nasl

Yaitu menjaga keturunan. Aspek ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak keturunan anak penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini juga melibatkan pencegahan terhadap diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mereka dalam konteks sosial dan kehidupan masyarakat.

d. Hifzh Al-Maal

Yaitu menjaga harta. Dalam hal ini, maqashid syariah melihat perlunya memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan keuangan anak penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk mendapatkan akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan, serta perlindungan terhadap hak warisan dan kepemilikan mereka.

e. Hifzh Ad-Din

Yaitu menjaga agama. Aspek ini mencakup pemastian bahwa anak penyandang disabilitas memissliki akses yang sama terhadap pendidikan agama, pengembangan spiritual, dan partisipasi dalam aktivitas keagamaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Dari perspektif Jasser Auda, pemahaman maqashid syariah ini menekankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan mendapatkan perlindungan serta dukungan yang mereka butuhkan agar dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan potensi mereka.¹⁶

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis tentang perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Bananul Amanah Madiun, dan juga bagaimana perlindungan anak berdasarkan perspektif PERMEN PPPA No. 4 Tahun 2017 dan juga maqashid syariah Jasser Auda.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum & Maqashid Syariah, (Jakarta, Kencana, 2020) hlm. 58

Sistematika Penulisan Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis memaparkan kajian teori yang membahasannya meliputi Anak penyandang disabilitas, Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas, Maqashid Syariah Jasser Auda dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab *keempat*, memuat Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data, dan temuan penelitian.

Bab *kelima*, memuat Pembahasan. Pada bab ini memuat 3 poin penting di dalam fokus penelitian yaitu, analisis tentang perlindungan anak penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Bananul Amanah Madiun, analisis tentang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Yayasan Bananul Amanah Madiun Berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, dan yang terakhir analisis tentang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Yayasan Bananul Amanah Madiun Berdasarkan Maqashid Syariah Jasser Auda.

Bab *keenam*, merupakan bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Bagian Akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.